



# **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2023**

### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja bidang keuangan dan kinerja bidang pelayanan dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan, Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dapat memanfaatkan secara langsung pendapatannya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun

2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 57);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD LABKESDA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.
7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah adalah Kepala UPTD Labkesda.
9. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPTD Labkesda yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
12. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD Labkesda.

13. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPTD Labkesda.
14. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan nasional yang bersifat wajib (*mandatory*), dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan
16. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD UPTD Labkesda termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
17. Pendapatan BLUD UPTD Labkesda yang bersumber dari APBD adalah pendapatan yang berasal dari dokumen pelaksanaan APBD.
18. Rekening kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD UPTD Labkesda pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD UPTD Labkesda.
20. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada BLUD UPTD Labkesda berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
21. Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain adalah hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD UPTD Labkesda.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemanfaatan pendapatan BLUD UPTD Labkesda.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mengatur pemanfaatan pendapatan BLUD UPTD Labkesda agar terlaksana secara efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminasi dan akuntabel.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pemanfaatan pendapatan BLUD UPTD Labkesda yang bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Labkesda yang bersumber dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan umum; dan
  - b. non kapitasi.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD Labkesda yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD UPTD Labkesda yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah dan sesuai dengan peruntukan yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD UPTD Labkesda.
- (5) Pendapatan BLUD UPTD Labkesda yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD UPTD Labkesda yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi :
  - a. jasa giro;
  - b. pendapatan bunga;
  - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPTD Labkesda;
  - e. investasi; dan
  - f. pengembangan usaha.

#### Pasal 5

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD UPTD Labkesda yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD UPTD Labkesda.

### BAB IV PEMANFAATAN PENDAPATAN

#### Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD UPTD Labkesda sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPTD Labkesda.

#### Pasal 7

- (1) Belanja BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
  - a. belanja operasi; dan
  - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD UPTD Labkesda untuk menjalankan tugas dan fungsi, terdiri atas :
  - a. belanja pegawai, antara lain :
    1. jasa pelayanan;
    2. honor panitia rekrutmen pegawai BLUD UPTD Labkesda;
    3. honor Pembina BLUD UPTD Labkesda;
    4. gaji pegawai BLUD;
    5. honor pendamping dan surveior akreditasi; dan
    6. honor KPA/PPTK/Pejabat Pengadaan.
  - b. belanja barang/jasa, antara lain :
    1. belanja obat;
    2. belanja bahan medis habis pakai;
    3. belanja bahan habis pakai;
    4. belanja bahan/material;
    5. belanja jasa kantor (listrik, air, telepon, internet, jasa konsultan audit, jasa pendampingan penyusunan RBA/laporan keuangan, jasa profesi/narasumber/ tenaga ahli lainnya);
    6. belanja pemeliharaan kendaraan bermotor dan pajak;
    7. belanja BBM;
    8. belanja cetak dan penggandaan;
    9. belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor;

10. belanja pakaian dinas dan atributnya;
  11. belanja selimut, bantal, Kasur, skerem dan gordena;
  12. belanja makan minum rapat;
  13. belanja makan minum pasien;
  14. belanja perjalanan dinas;
  15. belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis;
  16. belanja pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan;
  17. belanja pemeliharaan gedung/bangunan;
  18. belanja pemeliharaan alat-alat kantor; dan
  19. belanja pengangkutan dan pemusnahan limbah medis;
- c. belanja bunga; dan
  - d. belanja lain.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD UPTD Labkesda untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPTD Labkesda, terdiri atas :
- a. belanja tanah;
  - b. belanja modal pengadaan alat-alat bantu;
  - c. belanja modal pengadaan alat kantor;
  - d. belanja modal pengadaan alat rumah tangga;
  - e. belanja modal pengadaan komputer;
  - f. belanja modal pengadaan mebelair;
  - g. belanja modal pengadaan alat studio;
  - h. belanja modal pengadaan alat komunikasi;
  - i. belanja modal pengadaan alat kedokteran;
  - j. belanja modal pengadaan sarana dan jaringan air minum;
  - k. belanja modal pengadaan jaringan listrik; dan
  - l. belanja modal pengadaan gedung dan bangunan tempat kerja.

## BAB V ALOKASI PEMANFAATAN PENDAPATAN

### Pasal 8

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) dialokasikan sebesar 50 % untuk belanja jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1 bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ASN dan Non ASN pada BLUD.
- (3) Pendapatan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) dialokasikan sebesar 50 % untuk belanja operasi dan belanja modal kecuali belanja jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1.

BAB VI  
BELANJA JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu  
Prinsip dan Indikator

Pasal 9

- (1) Jasa pelayanan diberikan berdasarkan prinsip:
  - a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
  - b. kesetaraan dengan memperhatikan keberadaan BLUD UPTD Labkesda;
  - c. kepatutan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan pembiayaan BLUD UPTD Labkesda; dan
  - d. transparansi.
- (2) Selain diberikan berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jasa pelayanan juga diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indikator penilaian yang meliputi :
  - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
  - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
  - c. jabatan yang disandang (*position index*);
  - d. risiko kerja (*risk index*);
  - e. hasil/capaian kinerja (*performance index*); dan
  - f. kehadiran serta ketepatan waktu datang dan pulang kantor.
- (4) Pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Bagian Kedua  
Indeks Skor Individu

Pasal 10

- (1) Pengalaman dan masa kerja (*basic index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, dihitung secara linear dengan penambahan setiap tahun berdasarkan dokumen pengangkatan kepegawaian.
- (2) Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, dilihat berdasarkan dokumen kepegawaian yang terdiri atas keahlian dan ilmu pengetahuan dengan rincian penilaian sebagai berikut :
  - a. tenaga medis spesialis yang memiliki SIP diberikan nilai 200 (dua ratus);
  - b. tenaga medis yang memiliki SIP diberikan nilai 150 (seratus lima puluh);
  - c. tenaga kesehatan setara S1 (strata satu) atau D4 (diploma empat) yang memiliki SIP sesuai dengan jenis profesinya diberikan nilai 80 (delapan puluh);
  - d. tenaga non kesehatan setara S1 (strata satu) atau D4 (diploma empat) diberikan nilai 65 (enam puluh lima);



- e. tenaga kesehatan setara D3 (diploma tiga) yang memiliki SIP sesuai dengan jenis profesinya diberikan nilai 60 (enam puluh);
  - f. tenaga non kesehatan setara D3 (diploma tiga) diberikan nilai 50 (lima puluh);
  - g. tenaga kesehatan setara D3 (diploma tiga) yang tidak memiliki SIP sesuai dengan jenis profesinya dan tenaga non kesehatan dengan kualifikasi pendidikan dibawah D3 (diploma tiga) diberikan nilai 25 (dua puluh lima);
  - h. tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan S2 (strata dua) bidang kesehatan diberikan tambahan nilai 20 (dua puluh);
  - i. tenaga medis yang tidak memiliki SIP dan tenaga kesehatan setara S1 (strata satu) atau D4 (diploma empat) yang tidak memiliki SIP sesuai dengan jenis profesinya diberikan nilai 50 (lima puluh);
  - j. tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan S2 (strata dua) bidang non kesehatan diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh);
- (3) Jabatan yang disandang (*position index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, terdiri atas rincian penilaian sebagai berikut :
- a. pemimpin BLUD UPTD Labkesda diberikan nilai 120 (seratus dua puluh);
  - b. pejabat pengelola keuangan BLUD UPTD Labkesda diberikan nilai 55 (lima puluh puluh);
  - c. pejabat teknis BLUD UPTD Labkesda diberikan nilai 25 (dua puluh lima);
  - d. bendahara pengeluaran BLUD UPTD Labkesda diberikan nilai 40 (empat puluh);
  - e. bendahara penerimaan BLUD UPTD Labkesda diberikan nilai 30 (tiga puluh);
  - f. bendahara pembantu penerimaan, bendahara pembantu pengeluaran, pengelola barang dan pejabat pengadaan barang/jasa BLUD UPTD Labkesda masing-masing diberikan nilai 20 (dua puluh);
  - g. pengelola perencanaan diberikan nilai 20 (dua puluh);
  - h. pemilik SPI diberikan nilai 10 (sepuluh); dan
  - i. penanggung jawab upaya/program diberikan nilai 10 (sepuluh).
- (4) Risiko kerja (*risk index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, terdiri atas rincian penilaian sebagai berikut :
- a. risiko ringan, yaitu pekerjaan non klinis dan administrasi diberikan nilai 3 (tiga);
  - b. risiko sedang, yaitu pekerjaan klinis luar gedung diberikan nilai 5 (lima);
  - c. risiko berat, yaitu pekerjaan medis dan jabatan Pemimpin BLUD UPTD Labkesda diberikan nilai 10 (sepuluh).
- (5) Hasil/capaian kinerja (*performance index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f, diukur dari kontribusi individu dalam memberikan dan mendukung pelayanan sesuai posisi jabatan dengan rincian penilaian sebagai berikut :

- a. kinerja berprestasi diberikan tambahan nilai paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari total poin yang diperoleh; dan
  - b. kinerja buruk diberikan pengurangan nilai paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari total poin yang diperoleh.
- (6) Kehadiran serta ketepatan waktu datang dan pulang kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g, terdiri atas rincian penilaian sebagai berikut :
- a. datang dan pulang tepat waktu diberikan nilai 1 (satu) per hari;
  - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktu yang diakumulasikan sampai dengan 7 (tujuh) jam dikenakan pengurangan 1 (satu) poin;
  - c. tidak hadir karena sakit paling lama 3 (hari) kerja diberikan nilai 1 (satu) per hari sepanjang dapat dibuktikan dengan surat keterangan sakit; dan
  - d. melaksanakan tugas di luar kantor berdasarkan surat tugas oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan nilai 1 (satu) per hari.

### Bagian Ketiga Formulasi

#### Pasal 11

Pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{ph \times (pmk + kipp + jsd + rk + ck)}{TP} \times Rp$$

- Ph : Persentase kehadiran
- Pmk : pengalaman dan masa kerja
- Kipp : keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku
- Jsd : jabatan yang disandang
- Rk : risiko kerja
- Ck : hasil/capaian kinerja
- TP : Total Poin

## BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

Pertanggungjawaban dan pengawasan pengelolaan pendapatan BLUD UPTD Labkesda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam hal pendapatan BLUD UPTD Labkesda tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berjalan, maka menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 9 Agustus 2023  
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 9 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 42